

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Bibit Jati

1. Mengenal bibit jati

Salah satu produk bioteknologi yang mempunyai prospek cukup baik untuk diperkenalkan di kawasan transmigrasi adalah bibit jati. Perdagangan bibit diharapkan dapat sebagai usaha komersil skala petani kecil (*private nursery*), dan dapat menambah pendapatan transmigran dan penduduk lokal.

Tanaman jati dapat diperbanyak melalui cara generatif dan vegetatif. Cara generatif adalah dengan perbanyakan melalui biji yang disemaikan dan dibiarkan tumbuh tunas baru serta dipelihara sebagai bibit. Jika terlalu besar bibit diremajakan dengan cara memangkas batang dan dibiarkan tumbuh tunas baru, tunas ini di pelihara sebagai batang baru. Cara tersebut lebih dikenal dengan istilah Stump. Perbanyakan ini sudah dikenal di kalangan masyarakat. Sedangkan perbanyakan melalui vegetatif dilakukan melalui kultur jaringan, yaitu perbanyakan melalui pertumbuhan sel-sel jaringan titik tumbuh tanaman.

Cara pembibitan jati melalui kultur jaringan masih dilakukan oleh produsen bibit dan belum dapat diadopsi oleh petani, karena teknologi ini padat modal dan berteknologi tinggi. Peluang usaha yang dapat diadopsi dari teknologi ini adalah pembesaran bibit jati setelah fase aklimatisasi atau pada

fase adaptasi bibit dengan lingkungan luar laboratorium (bibit berumur ± 4 minggu).

Permasalahan dalam menggunakan produk bioteknologi khususnya bibit jati hasil kultur jaringan untuk meningkatkan produksi pertanian di kawasan transmigrasi adalah rendahnya kemampuan adopsi teknologi tersebut oleh transmigran, terbatasnya pemilikan modal dan tidak adanya akses ke sumber-sumber modal semacam lembaga keuangan formal. Selain itu, lokasi permukiman transmigrasi (kawasan transmigrasi) umumnya jauh dari pusat distribusi faktor produksi, termasuk bioteknologi, sehingga pengadaannya secara individual untuk digunakan secara kontinyu dalam meningkatkan produksi pertanian menjadi sangat mahal.

Oleh sebab itu, diperlukan suatu kajian tentang peluang dan kendala usaha pembibitan jati kultur jaringan skala kecil di kawasan transmigrasi. Sasaran kajian ini adalah tersedianya informasi peluang dan kendala pengembangan dan pemanfaatan bibit jati kultur jaringan sebagai usaha pembibitan skala rumah tangga di kawasan transmigrasi.

Sedangkan Persyaratan Tumbuh Jati yang ideal yaitu di tempat yang mempunyai iklim:

1. Jati tumbuh dibelahan Bumi 30° LS dan 30° LU
2. Intensitas curah hujan 1200-2500 mm/th dengan 3-5 bulan kering
3. Temperatur 19° C - 35° C

4. Intensitas cahaya 75-100% .¹

Sedangkan untuk persyaratan tanah maka agar pohon jati bisa tumbuh dengan ideal maka harus di tanam pada tanah yang sesuai dengan karakteristik tanaman ini, untuk persyaratan tanah yaitu:

1. Berbagai jenis tanah selain gambut
2. Tidak tergenang air
3. Lapisan solum yang dalam
4. Gembur, kaya bahan organik, unsur hara dan Kalsium
5. Ph 5-8
6. Tinggi tempat maksimum 700 m dpl.

Bibit jati akan tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki curah hujan 1.200 – 2.500 mm per tahun dengan 3 – 5 bulan kering (curah hujan kurang dari 50 mm per bulan), temperatur 19 – 36 ° C dan intensitas cahaya 75 – 100 persen.²

Departemen Transmigrasi telah menentukan batas kriteria kelayakan lahan untuk transmigrasi pola tanaman pangan antara lain kemiringan kurang dari 8 persen. Apabila lahan memiliki kemiringan lebih dari 8 persen, maka harus dilakukan tindakan konservasi tanah. Kemiringan lahan yang dimiliki petani terutama lahan pekarangan petani di daerah sosialisasi bibit jati kultur

¹ Tim Penyusun, *Jati Unggul*. (Jakarta: PT Fitotek, 2001), 12

² *Ibid.*, 14

jaringan tidak lebih dari 8 persen.³ Pemanfaatan lahan petani untuk produksi tanaman palawija dan tahunan kelihatan tidak mengalami hambatan, serta terlihat tertata dengan baik. Oleh karena itu terdapat peluang pembibitan jati kultur jaringan pada lahan pekarangan.

Ketersediaan lahan untuk usaha pembesaran bibit jati kultur jaringan skala kecil (200 batang bibit) per keluarga di lokasi penelitian tidak menjadi hambatan karena usaha tersebut hanya membutuhkan luasan lahan kurang lebih 100 m². Lahan pekarangan yang dimiliki penduduk umumnya 2.500 m² dan masih tersisa seluas 200-300 m² yang belum diusahakan, sehingga masih cukup luas untuk usaha pembibitan.⁴

Pembuatan media tanah untuk pembibitan tidak mengalami kesulitan karena bahan-bahan seperti tanah dan sekam tersedia dalam jumlah yang cukup. Media tanah dapat diambil dari lahan sekitar dan sekam gergaji atau sekam padi dapat diambil dari tempat penggerjajian kayu atau penggilingan padi dengan harga relatif murah sekitar Rp 50,- per kg. Tingkat kemasaman tanah yang dibutuhkan untuk media tanah dalam poly back sekitar 5,0-8,0. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pH tanah di lahan pekarangan sekitar 5,0-6,5.

Selain kendala fisik dan kesuburan tanah, usaha pembibitan jati kultur jaringan tidak lepas dari kendala hama dan penyakit bibit tanaman tersebut.

³ Tim Penyusun, *Pengembangan Hutan Rakyat Dengan Tanaman Jati Bagi Program Transmigrasi*. (Jakarta, Deptrans, 2001), 4

⁴ *Ibid.*, 7

Penyakit bibit tanaman tahunan yang sering menyerang seperti kutu daun, busuk akar dapat dikendalikan dengan penyemprotan obat-obatan kutu daun dan mengurangi kelembaban media tanah dalam poly back.

Hama yang kadang-kadang merusak areal pembibitan adalah babi hutan. Hama ini dapat dikendalikan dengan pembuatan pagar keliling. Menurut penangkar bibit tanaman tahunan seperti karet, kopi dan kelapa sawit yang ada disekitar lokasi, intensitas serangan hama dan penyakit dapat dikatakan relatif kecil sehingga tidak menjadi kendala yang berarti. Dengan pengalaman ini, maka pembibitan bibit jati kultur jaringan digolongkan layak bersyarat, yaitu serangan hama babi hutan dapat dikendalikan.

2. Manfaat Penanaman Bibit Jati

Mengingat pentingnya sumber bibit dalam mendukung pengembangan bidang pembibitan maka fasilitas dan sarana harus dipersiapkan. Adapun fasilitas dan sarana (laboratorium dan nursery pendukung) untuk memproduksi berbagai jenis bibit tanaman kehutanan, perkebunan, dan pertanian. Proses produksi bibit dilakukan dengan menerapkan teknik kultur jaringan tanaman dan micro cutting untuk menjamin bibit tanaman yang dihasilkan mempunyai sifat yang sama dengan induknya.

Kerusakan hutan Indonesia semakin parah Indonesia telah kehilangan 72% hutan alam utuh, sisa hutan alam surgawi (*Paradise Forest*) hanya tinggal 20% saja 40% dari tutupan hutan Indonesia telah hancur sama sekali

Laju kerusakan hutan: 1.6 juta hektar / tahun. Jika tidak ada penanaman ulang, dalam 12 tahun hutan Indonesia akan Punah.⁵

Kebutuhan pasokan kayu jati di Indonesia 2,5 juta m³/tahun Baru dapat dipenuhi 700.000 m³ (30% nya) Kebutuhan Kayu Jati Dunia baru dapat dipenuhi sekitar 20% (Sumber Data Dikutip dari *World Timber Organization* dan Departemen Kehutanan, 2004) Penanaman Ulang dengan Kayu Jati membantu program Reboisasi, penghijauan, pencegahan banjir dan longsor. Penebangan dilakukan berkesinambungan dengan Gerakan Penanaman Ulang kembali.⁶

Pengundulan hutan terus dilakukan tanpa berfikir resiko yang bakal mendatangkan bencana. Mulai dari banjir, tanah longsor, bencana kekeringan bahkan terakhir ancaman *global warming* yang begitu mengerikan. Kendati bencana alam datang silih berganti, namun hal ini tidak menyurutkan pelaku pembalakan liar untuk bertaubat demi kepentingan orang banyak.

Sebagai manusia bijak dan yang bertanggungjawab tentunya akan berupaya sebisa mungkin untuk melakukan penyelamatan hutan atau bumi yang ditempati ini. Dengan begitu, kita bakal terhindar dari penderitaan yang memilukan seperti yang terjadi di penjuru nusantara. Untuk itu, gerakan tanam pohon perlu digalakan dan didukung oleh semua pihak.

Gerakan tanaman pohon ternyata tidak hanya untuk menyelamatkan hutan, tapi usaha ini menjadi lahan bisnis yang menggiurkan. Betapa tidak, hanya dengan modal yang kurang dari 1 juta rupiah menghasilkan milyaran. Soalnya, harga 1 kilo biji jati super 100 ribu dan isinya 1500 biji. Apabila biji

⁵ <http://apakabarpsbg.wordpress.com/2009/04/29/budi-daya-pohon-jati/>, diakses pada 11 Desember 2009.

⁶ Ibid.

jati super tersebut disemai dan diperkirakan yang jadi 1.200 bibit jati, maka sepuluh tahun yang ke depan Anda bakal mengantongi minimal 1,1 milyar lebih. Menarik bukan? Silahkan Anda mencoba, sebelum menyesal datang kemudian.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merambah ke segala bidang. Pada intinya kehadiran teknologi mempermudah dan memperpendek serta memperbanyak hasil yang diinginkannya. Tak heran, beragam penemuan mukhtahir bermunculan termasuk teknologi pembibitan pohon jati. Bayangkan, pohon jati yang tadinya berumur puluhan tahun, kini telah dipersingkat menjadi 10 tahun, namanya Jati Super.

Proses pembibitannya berasal dari biji pohon jati yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pertumbuhannya lebih cepat ketimbang jati lokal. Bibit Jati Super ini diperoleh dari Kelompok Usaha Tani Putu Bogal, Nganjuk, Jawa Timur yang di ketuai oleh Solikhin.⁷

Menurut pengalaman penanan pohon Jati Super ini, pertumbuhannya lebih cepat ketimbang jati emas. Apalagi batang yang lurus menjulang keatas dan ditambah dengan daunnya yang lebar-lebar. Sehingga baru berumur 8 bulan saja, telah berdiameter 4 cm dengan catatan diberikan pupuk organik dan mendapat sinar matahari yang penuh.

⁷ <http://investasi-jati.blogspot.com/2008/05/investasi-jati-super-yang-menjajikan.html>, diakses pada 11 Desember 2009.

Proses penanaman dan pemeliharaan tergolong mudah serta tidak menyita banyak waktu. Cukup sekali tanam, kemudian tinggal melakukan pengontrolan rutin agar terhindar dari ketidaksuburan karena kurang pupuk atau gangguan tangan-tangan jahil. Maklum, si kuat ini menjadi incaran banyak orang. Apalagi hutan makin gundul akibat pembalakan liar yang membuat stok kayu kian menipis dan berujung pada melambungnya harga kayu. Apalagi kayu jati sudah dikenal dengan kualitas dan ketahanannya tak perlu diragukan lagi. Kalau sudah begini, harapan menjadi jutawan bahkan milyader sudah berada dalam genggam tangan Anda.

Guna mendapatkan jati yang kokoh dan tidak mudah roboh diterjang angin besar, ada baiknya dimulai dari sejak pemindahan dari poly back ke lubang tanam. Dimana pada bagian bawah lubang tanam tersebut diberikan lubang lagi menggunakan kayu sebesar jari tangan. Kemudian, akar tunggang bibit jati tadi dimasukkan ke dalam lubang itu. Dengan begitu, akar tunggangnya langsung menancap ke dalam tanah.

Gerakan tanam pohon memang hasilnya tidak langsung dirasakan sekarang. Tapi Anak cucu kitalah yang bakal menikmatinya. Dengan demikian, kita sebagai penanam pohon bakal menerima pahala dari Allah SWT. Karena menanam pohon merupakan bagian dari ibadah.

Ada pengecualian, untuk bulan juni hingga oktober disarankan jangan menyemai dulu karena kemungkinan untuk tumbuh agak sulit yang disebabkan faktor alam kurang mendukung.

3. Peluang Usaha Penanaman Bibit Jati

Menanam bibit jati tidak membutuhkan lahan yang sangat luas, kecuali jika ingin menanam bibit jati dalam dalam tempo jangka panjang untuk di di ambil kayunya. Lahan yang kita jual/kembangkan pada dasarnya boleh ditanam macam2 tanaman/tumbuhan tetapi minimal 50% dari lahan itu sebaiknya pohon jati.

Jati yang ditanam dan siap dipanen pada umur 5 tahun. Berikut perhitungan profit berdasarkan harga saat ini (per hektar) :

- a. Tahap pertama (50%) dari total pohon $666 \times 0,2198 \times \text{Rp. } 3.000.000,- = \text{Rp. } 439.160.400,-$
 - b. Tahap kedua (25%) dari total pohon $333 \times 0,4945 \times \text{Rp. } 5.000.000,- = \text{Rp. } 823.342.500,-$
 - c. Tahap ketiga (25%) dari total pohon $333 \times 1,0048 \times \text{Rp. } 8.000.000,- = \text{Rp. } 2.676.787.200,-$
- TOTAL Rp. 3.939.290.100,-

4. Teknik Penanaman Bibit Jati

Untuk teknik penanaman bibit jati langkah pertama yaitu persiapan membuat bibit jati, sebelum di tanam di lahan yang lebih luas adalah:

1. Pilihlah benih jati yang baik dengan ketentuan berdiameter 1-1,5 cm.
2. Jemur benih jati tersebut sampai betul-betul kering.

3. Setelah bibit jati itu kering, rendamlah bibit tersebut dengan campuran air accu dan air tawar dengan perbandingan 1 : 10 (air accu 1 liter perlu air tawar 10 liter) selama 3 hari.
4. Selanjutnya benih jati tersebut diangkat dan ditiriskan atau ditis selama 0,5 sampai 1 hari.
5. Siapkan media/bedeng tabur ukuran sembarang, dan di sekelilingnya dibuatkan pembatas.
6. Setelah media/bedeng siap, taburkan benih jati tersebut di atas bedengan.
7. Setelah benih jati ditabur semua, kemudian benih tersebut kita timbun dengan pasir hitam/pasir bengawan setebal 1,5-2 cm.
8. kemudian kita tutup bedeng tersebut dengan plastic, kalau tidak ada plastic bias kita tutup dengan dedaunan.
9. Selama di dalam bedeng, benih tidak boleh kering harus diatur kelembabannya.
10. Kemudian kita tunggu selama 7 – 14 hari.
11. Kalau sudah berkecambah harus kita pindahkan ke poly back yang sebelumnya sudah kita siapkan.
12. Poly back yang kita siapkan berisi tanah, pupuk organik/kandang, dan rambut padi, dengan perbandingan 1 : 3 : 2.

Sedangkan jika penanaman bibit sudah tumbuh subur dalam poly back maka langkah berikutnya adalah menanamnya dalam lahan yang lebih luas.

Untuk penanaman dalam lahan yang lebih luas dapat dilaksanakan sebagai berikut:

1. **Persiapan Lahan**

Lahan yang sekarang kami tanami dengan pohon jati emas sebenarnya sudah beberapa kali ditanami oleh tanaman-tanaman lainnya, seperti cengkeh, kemiri, singkong, jangung dan yang terakhir adalah rambutan. Lahan tersebut kami bersihkan dengan memotong seluruh pohon yang ada, kayu serta ranting-ranting sisa pohon kami bakar.

2. **Pembuatan Lubang**

Setelah lahan bersih kami lakukan pengukuran jarak jati untuk di tanam. Jarak penanaman yang kami lakukan adalah 2 x 2 meter. Tanah digali dengan ukuran lebar lubang adalah 40 x 40 cm dengan kedalaman 40 cm. Tanah Bagian atas dicampur dengan kurang lebih 5 kg pupuk kandang, diaduk-aduk sampai rata danembalikan kebagian dasar lubang.

3. **Penanaman**

Lepaskan poly back tanaman kemudian tanam bibit jati emas tersebut ditengah-tengah lubang yang telah dipersiapkan, lalu tutup dengan tanah bagian bawah yang tidak tercampur apapun.

4. **Pemberian vaksin**

Vaksin yang telah diberikan oleh perusahaan dicampur dengan air, kemudian disiramkan pada tiap pohon jati yang baru ditanam. Usahakan

vaksin yang telah dicampur air tersebut sampai kedalam tanah. Pemberian vaksin dilakukan setelah pohon jati ditanam antara 1 s.d 2 minggu.

5. Pemupukan

Hal yang sangat penting dalam pembudidayaan tanaman jati adalah faktor pemupukan. Dengan pemupukan yang teratur dan dengan dosis yang sesuai maka jati akan tumbuh sesuai dengan yang diharapkan. Pemupukan dengan dua cara yaitu dengan pupuk kandang (kompos) dan dengan pupuk kimia. Dengan pupuk kimia dapat menggunakan NPK 15 15 15 sebanyak 250 gr. selama 6 bulan (2 kali pemupukan). Setelah itu dengan dosis NPK 15 15 15 sebanyak 500 gr. setiap 6 bulan sekali selama 2,5 tahun (5 kali pemupukan). Setelah itu pemupukan kimia dapat dilakukan setiap tahun sampai jati dipanen. Dosis pemupukan kimia tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi tanah.

6. Penyemprotan Hama

Hama yang menyerang pohon jati yang kami alami adalah berupa ulat, belalang putih maupun rayap. Ulat menyerang pada pohon jati dibawah 1 tahun. Ulat menyerang daun dengan memakannya sampai dengan pucuk batang pohon jati. Biasanya ulat menyerang pada malam s.d. pagi hari. Usahakan sesering mungkin untuk melihat pohon jati, terutamanya pohon jati dibawah usia 1 tahun. Membasmi ulat dapat dilakukan dengan menyemprotkan pestisida, antaranya Decis, Bulldog ataupun Curacron.

B. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Apa yang ada dalam benak kita manakala mendengar atau membaca istilah kesejahteraan ekonomi? Apakah kita memandang kesejahteraan ekonomi sebagai kondisi kehidupan, kegiatan yang terorganisir, atau sebagai sebuah ilmu? Dengan memfokuskan kesejahteraan ekonomi sebagai sebuah teori, maka penulis akan mengurai definisi tentang kesejahteraan ekonomi.

Apabila kita cari dalam literatur ekonomi, ternyata terminologi kesejahteraan memiliki banyak pengertian. Definisi "kesejahteraan" dalam sistem ekonomi kapitalis-konvensional merupakan konsep materialis murni yang menafikan keterkaitan ruhaniah. Akan tetapi, sebagian masyarakat menginginkan kesejahteraan lahir batin, yang berarti bahwa kesejahteraan yang diinginkan adalah tidak menafikan dan mempunyai ketersinggungan dengan aspek ruhaniah. Konsep kesejahteraan yang memasukkan tujuan kemanusiaan dan keruhaniaan, tentu akan berakibat pada keharusan mendiskusikan secara ilmu ekonomi apa hakekat tujuan kesejahteraan tersebut dan bagaimana merealisasikannya.

Tujuan-tujuan konsep kesejahteraan dalam kedua visi tersebut tidak hanya mencakup soal kesejahteraan ekonomi dalam arti materi semata, tetapi juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan sosial-ekonomi, kesucian kehidupan, kehormatan individu, kehormatan

harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.

Konsep kesejahteraan lahir bathin dapat dikatakan telah direalisasikan apabila unsur-unsur berikut telah terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar bagi semua masyarakat terpenuhi, tingkat perbedaan sosial-ekonomi tidak terlalu mencolok, *full employment* (tidak adanya pengangguran usia produktif), keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, stabilitas ekonomi dicapai tanpa beban hutang luar negeri yang berat, tingkat inflasi tidak tinggi, penyusutan sumber daya ekonomi yang tidak dapat diperbaharui tidak tinggi, dan kerusakan ekosistem yang dapat membahayakan kehidupan tidak terjadi.

“Kesejahteraan ekonomi” memiliki arti yang berwayuh wajah. Ia dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Kesejahteraan ekonomi dapat diartikan sebagai pendekatan atau kegiatan yang terorganisir dalam bidang pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, kesejahteraan ekonomi biasanya merujuk pada arena atau *field of practice* tempat berkiprah berbagai profesi kemanusiaan, termasuk pekerja sosial, dokter, perawat, guru, psikolog, dan psikiater.⁸

Lebih lanjut Edi Suharto menjelaskan:

Di negara-negara maju, kesejahteraan ekonomi sangat identik dengan jaminan sosial (*social security*), seperti *public assistance* dan *social insurance*, yang diselenggarakan negara terutama

⁸ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*: (Bandung: Refika Aditama, 2006), 4

untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Di Indonesia, kesejahteraan ekonomi sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.⁹

Jika dilihat dari disiplin akademis kesejahteraan ekonomi identik dengan kesejahteraan sosial, seperti yang disampaikan oleh Zastrow:

Kesejahteraan ekonomi identik dengan kesejahteraan sosial jika hal tersebut dipandang sebagai ilmu atau disiplin akademis yang mempelajari kebijakan sosial, pekerjaan sosial, dan program-program pelayanan sosial. Seperti halnya sosiologi, psikologi, antropologi, ekonomi, politik, studi pembangunan, dan pekerjaan sosial, ilmu kesejahteraan sosial berupaya mengembangkan basis pengetahuannya untuk mengidentifikasi masalah sosial, penyebabnya dan strategi penanggulangannya.¹⁰

Pada masa awal perkembangannya, kesejahteraan sosial memiliki basis ilmu yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu sosial lain, terutama filsafat, sosiologi, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi.¹¹

Sedangkan masyarakat bisa diartikan sebagai “kumpulan orang yang hidup di suatu wilayah yang memiliki aturan atau norma yang mengatur hubungan satu sama lain”.¹²

Pola hubungan antar individu tersebut pada dasarnya memiliki nilai-nilai yang diakui bersama dan diabadikan dalam norma dan aturan yang pada umumnya tidak diverbalkan. Dengan demikian masing-masing individu

⁹ Ibid., 5

¹⁰ Zastrow, Charles H. *The Practice of Social Work*, Pacific Grove: Brooks/ Cole. 22

¹¹ Ibid., 23

¹² Abdul Latif, *Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2007), 33.

diharuskan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut sehingga tercipta satu hubungan sosial yang relatif stabil.

Jadi yang dimaksud dengan kesejahteraan masyarakat adalah kumpulan orang yang hidup di suatu wilayah tertentu yang melaksanakan suatu kegiatan yang terorganisir, direncanakan dalam bidang pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2. Teori-teori Kesejahteraan Ekonomi

Perkembangan kesejahteraan ekonomi menjadi sebuah bidang ilmu juga tidak dapat dilepaskan dari wacana mengenai peran negara dalam pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Karenanya, kesejahteraan ekonomi sangat terkait dengan tiga ideologi 'besar' (*grand ideology*) atau mazhab pemikiran yang berkembang di Amerika Serikat dan Eropa Barat, yaitu: liberalisme, konservatisme dan strukturalisme.¹³

Ketiga ideologi ini memiliki pandangan berlainan tentang bagaimana seharusnya negara berperan dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang kemudian melahirkan sistem 'negara kesejahteraan' (*welfare state*) dan mempengaruhi perkembangan paradigma kesejahteraan ekonomi dan pendekatan pekerjaan sosial.

Berikut penulis uraikan tentang teori-teori kesejahteraan ekonomi menurut madzhab pemikiran besar dunia.

¹³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat...21*

a. Liberalisme

Kaum liberal mendukung *welfare state*. Negara merefleksikan kehendak individu dan dipilih berdasarkan perwakilan kelompok. Negara memiliki legitimasi untuk mengatur dan bertindak.

Tiga intervensi negara yang diperlukan dalam pembangunan mencakup: (a) penciptaan distribusi pendapatan, (b) stabilisasi mekanisme pasar swasta, dan (c) penyediaan barang-barang publik (*public goods*) yang tidak mampu atau tidak efisien disediakan oleh pasar.¹⁴

Dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Edi Suharto menjelaskan:

Individu dan kelompok adalah warga Negara yang sehat, namun punya potensi menjadi rentan (*vulnerable*) dan bermasalah dikarenakan adanya kesalahan sistem atau lingkungan. "*Blaming the system*" adalah pandangan utama ideologi ini. Masalah ekonomi, termasuk orang yang mengalaminya, diakibatkan bukan oleh kesalahan individu yang bersangkutan, melainkan oleh kesalahan sistem.¹⁵

Jadi kesejahteraan ekonomi berporos pada paradigma institusional-universal yang meyakini bahwa masalah sosial hanya bisa dipecahkan dengan program pelayanan sosial yang melembaga, berkelanjutan, dan mencakup semua warga.

¹⁴ Ibid., 25

¹⁵ Ibid 27

Pendekatan pekerjaan ekonomi menekankan pentingnya aspek pencegahan dan pengembangan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Program-program pengembangan masyarakat (*community development*), termasuk *community empowerment*, *capacity building* dan *social entrepreneurship* dianggap paling ampuh dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

b. Konservatisme

Mazhab konservatisme adalah penentang *welfare state*. Sistem politik pada hakekatnya bersifat fungsional dan karenanya akan lebih baik jika dibiarkan berjalan sendiri. Masalah ekonomi terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan individu yang bersangkutan. Misalnya, karena malas, tidak memiliki jiwa wirausaha dan karakteristik budaya kemiskinan lainnya.

Solusi yang diajukan oleh para penganut "*blaming the victim*" ini pada intinya membatasi peran pemerintah dan menekankan perubahan pada individu dan kelompok-kelompok kecil. Paradigma kesejahteraan ekonomi berpijak pada pandangan dengan residual-selektifitas.

Pelayanan sosial hanya perlu diberikan kepada kelompok lemah secara temporer manakala lembaga pasar dan keluarga tidak berfungsi. Pendekatan pekerjaan sosial lebih menitikberatkan pada pelayanan

langsung dan rehabilitasi sosial-klinis untuk membantu orang agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.¹⁶

c. Strukturalisme

Kaum struktural memandang masalah ekonomi sebagai akibat adanya ketimpangan pada sistem atau struktur sosial masyarakat. Masalah ekonomi adalah situasi tidak terhindarkan dan akan selalu ada dalam sistem yang *classist*, *sexist* dan *racist*, karena sistem seperti itu menciptakan ketidakadilan melalui perbedaan-perbedaan status sosial.¹⁷

Kedadaan ini akan semakin membesar dan memburuk dalam sebuah sistem ekonomi kapitalis. Rakyat adalah korban dan objek eksploitasi orang-orang yang memiliki kekuasaan dan privilege. Solusinya: rakyat harus berjuang memperoleh kekuasaan dan menjangkau sumber-sumber. Sistem ekonomi, sosial dan politik harus diubah dan direstrukturisasi secara menyeluruh.

Para penganut mazhab strukturalisme memiliki kesamaan pandangan dengan kaum liberal. Mereka menganut faham "*blaming the system*" atau lebih tepatnya "*blaming the structure*" serta paradigma kesejahteraan sosial yang bersandar pada model institusional-radikal.

Yang membedakannya dengan kaum liberalis adalah bahwa pendekatan pekerjaan sosial yang dikembangkan oleh kelompok

¹⁶ Ibid, 31

¹⁷ Ibid, 35

strukturalis lebih memfokuskan pada perubahan lingkungan pada aras makro. Analisis kebijakan sosial, advokasi kelas dan aksi-aksi sosial dan politik adalah beberapa metoda yang sering digunakan untuk melakukan perubahan sosial secara struktural dan radikal.

Skema perlindungan sosial, seperti *social security*, *welfare-to-work programmes*, *social safety nets*, dan *conditional cash transfer* adalah beberapa program yang umumnya diterapkan oleh mazhab ini.¹⁸

d. Neo liberalisme

Teori neo-liberal berakar pada karya politik klasik yang ditulis oleh Thomas Hobbes, John Lock dan John Stuart Mill yang intinya menyerukan bahwa komponen penting dari sebuah masyarakat adalah kebebasan individu.

Dalam bidang ekonomi, karya monumental Adam Smith, *the Wealth of Nation* (1776), dan Frederick Hayek, *The Road to Serfdom* (1944), dipandang sebagai rujukan kaum neoliberal yang mengedepankan azas *laissez faire*, yang oleh Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:72) disebut sebagai ide yang mengusulkan "*the almost complete absence of state's intervention in the economy.*" Secara garis besar, para pendukung neo-liberal berargumen bahwa kesejahteraan ekonomi harus disediakan oleh kelompokkelompok swadaya, lembaga-lembaga keagamaan atau oleh keluarga. Peran negara hanyalah sebagai "agen residual" atau "penjaga malam" yang baru boleh ikut campur manakala lembaga-lembaga di atas tidak mampu lagi menjalankan tugasnya.¹⁹

¹⁸ Ibid., 13

¹⁹ <http://www.mail-archive.com/ekonomi-nasional@yahoogroups.com/info.html>, *Menuju Masyarakat Mandiri: Pengembangan Model Sistem kesejah teraan ekonomi (Terjemahan)*. Diakses tanggal 02 Desember 2009.

Meskipun secara teoretis kaum neo-liberal menolak tanggung jawab Negara dalam usaha kesejahteraan sosial, dalam praktiknya mereka hanya mengusulkan penyesuaian kembali program-program kesejahteraan sosial, ketimbang menghapuskannya sama sekali.

Berpijak pada *public-choice theory*, *agency theory*, dan *transaction-cost theory*, mereka pada intinya ingin mengganti pengaruh para politisi dan kelompok-kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan, dengan keputusan-keputusan yang berdasarkan kepentingan konsumen sejalan dengan prinsip ekonomi pasar bebas. Penerapan program-program *structural adjustment* di beberapa negara merupakan contoh kongkrit dari pengaruh neoliberal dalam bidang kesejahteraan sosial ini.

Keyakinan yang berlebihan terhadap keunggulan mekanisme pasar yang secara alamiah dianggap mampu mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan sosial mendapat kritik dari kaum demokrat sosial.

Berpijak pada analisis Karl Marx dan Frederick Engels, pendukung demokrat sosial menyatakan bahwa "*a free market did not lead to greater social wealth, but to greater poverty and exploitation...a society is just when people's needs are met, and when inequality and exploitation in economic and social relations are eliminated*".²⁰

²⁰ Ibid., 14

Teori ini berporos pada prinsip-prinsip ekonomi campuran (*mixed economy*) dan majemen ekonomi Keynesian. Teori ini muncul sebagai jawaban terhadap depresi ekonomi yang terjadi pada tahun 1920-an dan awal 1930-an. Sistem negara kesejahteraan yang menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan negara dalam pemberian pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, sangat dipengaruhi oleh pendekatan “ekonomi manajemen-permintaan” (*demand-management economics*) gaya Keynesian ini.

Meskipun tidak setuju sepenuhnya terhadap sistem pasar bebas, kaum demokrat sosial tidak memandang sistem ekonomi kapitalis sebagai evil. Bahkan kapitalis masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. Hanya saja, kapitalisme perlu dilengkapi dengan system negara kesejahteraan agar lebih berwajah manusiawi. “*The welfare state acts as the human face of capitalism,*” demikian menurut Cheyne, O’Brien dan Belgrave.²¹

Dari beberapa teori kesejahteraan ekonomi yang telah penulis uraikan di atas dapat diketahui bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis lebih sepakat dengan teori konservatisme, karena dalam teori konservatisme dijelaskan bahwa masalah ekonomi terjadi bukan karena kesalahan sistem, melainkan kesalahan individu yang bersangkutan. Misalnya, karena malas, tidak memiliki jiwa wirausaha dan karakteristik budaya kemiskinan lainnya.

Dalam hal penanaman bibit jati petani diharapkan dapat bekerja dengan semaksimal mungkin, karena hasil yang diharapkan adalah output

²¹ Ibid., 17

dari kerja kerasnya, agar mendapat hasil yang maksimal petani jati di ukur dari pekerjaan yang dilakukannya, semakin sedikit menggantungkan pekerjaan pada orang lain maka akan semakin besar keuntungan yang didapat. Inilah yang menjadi titik temu dari teori konservatisme dengan kesejahteraan masyarakat petani jati yaitu semakin individu bekerja dengan maksimal (menghilangkan malas) maka akan semakin tinggi hasil yang didapat.

Di sisi lain teori konservatisme juga menekankan pada aspek kesetaraan, karena Negara tidak berhak mendominasi sumberdaya masyarakat, sehingga individu dituntut untuk mampu mengeksplorasi sumber daya alam dan manusia yang ada. Hal ini merupakan prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan dalam memenuhi kebutuhan hidup tiap-tiap warga masyarakat. Pencapaian kebebasan hanya dimungkinkan jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber, seperti pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan lebih dari sekedar bebas dari pengaruh luar; melainkan pula bebas dalam menentukan pilihan-pilihan (*choices*).

Dengan kata lain kebebasan berarti memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Misalnya, kemampuan memenuhi kebutuhan dasarnya, kemampuan menghindari kematian dini, kemampuan menghindari kekurangan gizi, kemampuan membaca, menulis dan berkomunikasi. Negara karenanya memiliki peranan

dalam menjamin bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan yang memungkinkan mereka menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Dengan demikian dalam meningkatkan kebebasan ternyata dapat menyediakan penghasilan dasar dengan mana orang akan memiliki kemampuan (*capabilities*) untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya (*choices*). Sebaliknya, ketiadaan kesejahteraan ekonomi dasar dapat menyebabkan ketergantungan (*dependency*) karena dapat membuat orang tidak memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan kesejahteraan ekonomi adalah kemampuan masyarakat secara mandiri untuk terus berkembang serta mewaspadaikan, mencegah, dan mengatasi terjadinya krisis, yang bersumber dari faktor internal maupun faktor eksternal, sehingga dapat terwujud suatu kesejahteraan sosial yang adil.

Dalam pengertian tersebut, beberapa hal perlu mendapat perhatian, yaitu:

a. Pengertian dan ruang lingkup masyarakat.

Seringkali, wacana pembicaraan mengenai kesejahteraan masyarakat menempatkan masyarakat sebagai pihak yang berbeda dengan pemerintah, bahkan sering berbeda dengan pengusaha swasta besar.

Jika dilihat dari perspektif kemanusiaan seperti di atas, yang dimaksud dengan masyarakat adalah manusia-manusia yang terhimpun berdasarkan suatu alasan, seperti organisatoris, geografis, kelembagaan, dan hal lainnya.

Perbedaan posisi atau status hanya merupakan bentuk diferensiasi peran dan fungsi dalam satu kesatuan masyarakat yang utuh. Oleh sebab itu, pengertian masyarakat (*community*) dapat pula diartikan sebagai rakyat (*people*), lebih dari *citizen*, yang mencakup unsur-unsur penduduk, pemerintah, pengusaha, NGO, dan sebagainya. Kemudian, sistem pemerintahannya disebut *governance*.

b. Pengertian mandiri.

Mandiri atau kemandirian seringkali diterjemahkan sebagai kemampuan sendiri, artinya menggunakan sumber daya sendiri, kerja sendiri, dan dalam lingkungan yang diciptakan sendiri (tertutup). Pada masa lalu, hal ini mungkin memiliki pendukung yang cukup kuat. Namun, dalam lingkungan serba global dan terbuka, hal tersebut tidak dapat lagi dipertahankan.

Oleh sebab itu, pengertian “secara mandiri” diartikan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dalam mendayagunakan seluruh sumber daya yang memungkinkan, termasuk bantuan luar untuk mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan kecenderungan dunia saat ini, yaitu perubahan dari *global dependence*

menjadi *local interdependence* atau lebih kecil lagi *individual interdependence* yang identik dengan *relationship* (keterhubungan).

c. Pengertian mewaspada, mencegah, dan mengatasi.

Hal ini memiliki dimensi dinamis dan antisipatif. Hanya dengan kemampuan mewaspada, kejadian buruk atau krisis yang akan terjadi dapat dicegah atau diminimalkan resikonya. Kalaupun kejadian buruk ini terjadi juga karena faktor bencana atau malapetaka, masyarakat secara mandiri masih bisa meminimalkan resiko. Dengan demikian, mereka juga memiliki pengertian sebagai suatu proses yang berkesinambungan dan berkelanjutan (*continuous process*).

d. Pengertian “krisis” itu sendiri.

Dalam batasan ini, yang dimaksud dengan krisis adalah segala sesuatu yang mengganggu dan merusak banyak sendi masyarakat dalam luasan lingkup dan waktu yang sangat substansial sehingga membahayakan dan menjauhkan masyarakat dari pencapaian tujuan kesejahteraan

e. Pengertian kesejahteraan yang adil.

Yaitu kesejahteraan yang diperoleh tanpa eksploitasi terhadap salah satu anggota, atau salah satu bagian masyarakat, atau masyarakat itu sendiri secara keseluruhan, dan imbalan (*reward*) kesejahteraan yang diterima sesuai dengan kontribusi yang diberikan. Dalam konteks ini, hubungan manusia lebih bersifat *substantive-functional*.

Berdasarkan pengertian kesejahteraan ekonomi di atas, maka yang dimaksud dengan sistem kesejahteraan ekonomi adalah rangkaian komponen terkait yang sinergis untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Batasan mengenai sistem kesejahteraan ekonomi (SKE) ini kemudian membatasi lingkup kesejahteraan ekonomi itu sendiri, yaitu:

a. Pemberdayaan Keluarga.

Sistem kesejahteraan ekonomi dalam suatu wilayah masyarakat ditentukan oleh proses pemberdayaan keluarga sebagai unit sosial dan kekerabatan paling kecil dalam masyarakat. Bila keluarga mampu mewujudkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan, maka kesejahteraan ekonomi akan lebih mudah diwujudkan.

b. Pemberdayaan Wilayah Komunitas.

Kesejahteraan ekonomi melingkupi pemberdayaan wilayah, dalam arti sistem kesejahteraan ekonomi dibangun mulai dari ketahanan wilayah komunitas masyarakat terkecil yang memungkinkan dilakukannya perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pengembangan sistem keterjaminan sosial.

Lingkup terkecil yang dipandang paling tepat adalah tingkat desa, mukim, atau – dalam beberapa kondisi tertentu – dusun atau kekerabatan adat yang setara. Dengan demikian, kesejahteraan ekonomi di tingkat nasional dibangun atas kesejahteraan ekonomi masing-masing daerah dengan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

c. Pemberdayaan Energi Sosial Kreatif

Energi sosial adalah kemampuan masyarakat secara bersama-sama memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia. Energi ini merupakan kekuatan pokok yang memungkinkan tumbuhnya sistem yang berkedaulatan rakyat. Sistem kesejahteraan ekonomi dibangun dan dilaksanakan dengan memberdayakan energi sosial kreatif yang ada dalam masyarakat. Sejalan dengan lingkup ketahanan wilayah komunitas dan pengertian kemandirian maka basis utama pengembangan SKS bertumpu pada energi sosial masyarakat sendiri.²²

Kalaupun diperlukan dukungan eksternal, dukungan tersebut merupakan pembukaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat pada sumber daya dan cara penggunaannya. Dukungan lain adalah proses penyadaran dan pemberian pengetahuan mengenai kemampuan yang sebenarnya dimiliki masyarakat untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri.

Mengacu pada batasan energi sosial bersumber pada 3 (tiga) unsur yang saling terkait, yaitu: i) *Gagasan (ideas)* adalah hasil pikiran progresif yang tampil dan diterima bersama. Gagasan dapat datang dari dalam atau dari luar satuan sosial; dari dalam atau dari luar kelompok masyarakat.²³

²² Departemen Sosial RI. *Petunjuk Pelaksanaan Program Kesejahteraan ekonomi Melalui Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Bagi Pekerja Mandiri di Sektor Informal*. (Jakarta. 2005.), 1

²³ *Ibid.*, 3

Biasanya, gagasan semacam ini diterima oleh masyarakat karena dinilai bermanfaat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup warga masyarakat. Gagasan semacam itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sehingga senantiasa mengandung nilai manfaat yang nyata dan akan dapat menjadi acuan pola pikir dan pola tindak masyarakat dalam kehidupan sosial; ii) *Idaman (ideal)* adalah harapan atau kepentingan bersama yaitu wujud kesejahteraan bersama sebagai buah realisasi gagasan (*ideals*). Dalam hal ini, berlaku norma dasar : “berbuat bagi orang lain sebagaimana orang lain berbuat bagimu.” *Idaman* ini dapat menjadi semacam idealisme dari masyarakat yang bersangkutan, sehingga dalam diri setiap warga masyarakat ada dorongan atau motivasi untuk mewujudkannya; dan iii) *Persaudaraan (friendship)* merupakan wujud solidaritas dalam suatu satuan sosial sebagai daya utama dalam proses mencapai idaman yang telah dikukuhkan..²⁴

Solidaritas muncul secara melembaga dalam kelembagaan lokal karena berbasis pada kesamaan dan kesepakatan atas harapan atau kepentingan (*ideals*) yang disadari dan dimiliki bersama, serta ingin diwujudkan dalam sistem sosial tertentu. Keberadaan ketiga unsur energi social tersebut menjadi dasar terjadinya kerjasama saling tolong

²⁴ Pusat Kajian Administrasi Internasional. *Kajian Analisis Kebijakan Sistem Kesejahteraan ekonomi Menuju Masyarakat Mandiri*. (Jakarta: LAN. 2006), 3

menolong, dan berkembangnya kepedulian sosial dalam suatu konteks keterjaminan sosial.

d. Pemberdayaan Kelembagaan Lokal.

Konsisten dengan pemikiran di atas, maka dengan memanfaatkan kelembagaan lokal yang sudah ada. Pembentukan lembaga baru bukan merupakan prioritas pengembangan. Lembaga baru akan dibangun jika masyarakat sendiri yang membentuknya dan lembaga lama tidak mampu lagi menjalankan fungsi yang dibutuhkan dalam pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Salah satu aspek penting yang perlu dilakukan oleh dan dengan pemberdayaan kelembagaan lokal adalah menentukan atau mengevaluasi kemiskinan (*poverty assessments*).

Pelaksanaan *poverty assessments* membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Namun, hasil yang diperoleh bisa sangat menentukan keberhasilan seluruh sistem kesejahteraan ekonomi itu sendiri. Pelibatan kelembagaan lokal dalam arti organisasi, norma, tata aturan, hingga individu lokal akan memberikan manfaat:

- (a) *Consistency*, peningkatan pemahaman terhadap dinamika aspek-aspek kultural, sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan aspek-aspek kesejahteraan ekonomi itu sendiri;
- (b) *Reality*, menjamin bahwa strategi pengembangan yang akan dilakukan benar-benar merefleksikan kondisi nyata dalam masyarakat, realistis, dan dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri;
- (c) *Sustainability*, mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan sistem; dan
- (d)

Stimulation, membangun kapasitas sosial untuk mengembangkan program yang mungkin pada awalnya dibangun atas bantuan dari luar.²⁵

3. Aspek-aspek Kesejahteraan Ekonomi

Aspek-aspek kesejahteraan ekonomi yang akan dibangun perlu mencakup: ketahanan pangan, kesehatan, sandang, kerja dan usaha, perumahan dan pendidikan. Urutan tersebut diperkirakan merupakan urutan kepekaan masyarakat terhadap krisis.

Artinya, jika krisis melanda maka yang pertama kali akan dikorbankan adalah pendidikan, dan jika telah mencapai krisis pangan maka kondisi yang terjadi sudah merupakan bencana yang sangat serius. "Tetapi ditinjau dari sudut pandang pemerintah, layanan harus diprioritaskan kepada aspek pendidikan, kesehatan, pangan, serta kerja dan usaha".²⁶

a. Pangan.

Ketahanan pangan dapat diamati dari 3 (tiga) dimensi, yaitu: a) Dimensi sasaran nasional; b) Dimensi waktu atau musim; dan c) Dimensi social ekonomi pangan.²⁷ Pencapaian ketahanan pangan dapat terlihat dari ketersediaan pangan, produksi pangan, konsumsi pangan, konsumsi gizi, dan status gizi.

²⁵ Ibid

²⁶ Departemen Sosial RI. *Petunjuk Pelaksanaan...*, 14

²⁷ Ibid., 24

Usaha untuk mewujudkan ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga dapat ditempuh melalui peningkatan keefektifan dan efisiensi distribusi pangan, peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan kemampuan penyediaan pangan, peningkatan pembentukan cadangan pangan, dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi

Berdasarkan kesepakatan *World Food Summit*, ketahanan pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan anggota rumah tangga dalam jumlah, mutu, dan ragam sesuai budaya setempat dari waktu ke waktu agar hidup sehat dan produktif.²⁸

Definisi ketahanan pangan rumah tangga yang digunakan di Indonesia belum mensosialisasikan kesepakatan internasional tersebut, karena definisi formal ketahanan pangan yang digunakan terbatas pada kondisi tersedianya pangan yang cukup, bermutu, dan aman di rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 7/1996.

Jika pangan merupakan kebutuhan dasar (*basic needs*) suatu rumah tangga atau masyarakat, maka ketahanan pangan menjadi aspek yang paling utama dalam sistem keterjaminan sosial.

b. Kesehatan.

Kesehatan setiap anggota keluarga merupakan syarat mutlak untuk dapat bekerja produktif, menghasilkan pendapatan yang akan digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup lainnya.

²⁸ Ibid., 27

Meskipun ketahanan pangan keluarga akan menentukan kesehatan anggota keluarga, tetapi kesehatan anggota keluarga juga dapat ditentukan oleh faktor-faktor nonpangan, seperti infeksi patogen, pelayanan kesehatan dan perubahan lingkungan.

Oleh karena itu, keterjaminan kesehatan merupakan salah satu aspek dalam keterjaminan sosial. Upaya minimal untuk bertahan hidup adalah bebas dari penyakit serius. Hal ini seringkali tidak dapat dipenuhi oleh anggota keluarga. Berdasarkan pertimbangan ini, aspek kesehatan dalam kesejahteraan ekonomi menunjukkan kemampuan keluarga untuk mengakses pelayanan kesehatan bagi setiap anggota keluarga yang mengalami gangguan kesehatan serius.

c. Sandang dan Perumahan.

Pakaian dan perumahan merupakan kebutuhan untuk meminimalkan resiko perubahan lingkungan yang akan berdampak pada gangguan kesehatan. Disamping itu, pakaian dan perumahan juga merupakan wahana untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial-psikologis keluarga dan anggotanya.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, pemilihan pakaian secara kuantitas maupun kualitas dapat dijadikan sebagai indikator keterjaminan sandang. Demikian pula halnya dengan perumahan. Kualitas dan luas lantai rumah yang dimiliki

²⁹ Pusat Kajian Administrasi Internasional. *Kajian Analisis Kebijakan...*,5

dapat dijadikan sebagai indikator pemenuhan kebutuhan papan atau perumahan dalam konteks keterjaminan sosial.

d. Usaha dan Kerja.

Kerja merupakan sumber utama pendapatan masyarakat. Namun, kerja seringkali merupakan basis eksistensi seseorang atau suatu keluarga. Sebagaimana ditunjukkan oleh kondisi krisis, kehilangan pekerjaan merupakan pukulan pertama yang memicu bentuk ketidaksejahteraan lain. Pecantuman keterjaminan kerja dan usaha sebagai aspek kesejahteraan ekonomi dan bukan pendapatan merupakan usaha untuk memberikan jaminan keberlanjutan yang lebih baik, juga untuk mengoreksi kemungkinan masalah daya beli, aksesibilitas yang tertutup, ketiadaan kebutuhan, serta mengurangi pelaksanaan yang manipulatif.

Aspek keterjaminan kerja dan usaha dapat diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk terus menjaga ketersediaan lapangan pekerjaan dan memberikan kesempatan berusaha bagi anggota masyarakat dalam berbagai kondisi dan melalui mekanisme sosial tertentu. Hal ini melahirkan banyak konsekuensi kebijakan, mulai dari tingkat makro (nasional) hingga ke tingkat rumah tangga.

Beberapa di antaranya adalah: a) Promosi kegiatan ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal dan pasar lokal; b) Mengembangkan berbagai pengubah ekonomi (nilai tukar, tingkat bunga, anggaran pemerintah, pajak, dan lain-lain), yang bersahabat dengan pengembangan kegiatan

ekonomi sebagian besar rakyat; c) Membiasakan tabungan dan cadangan mulai dari tingkat nasional, daerah, desa, hingga rumah tangga; dan d) Membudayakan kebiasaan berusaha secara baik melalui pengenalan sumber daya yang dimiliki dan prospek jenis.³⁰

4. Kesejahteraan Ekonomi Menurut Islam

Perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam.³¹ Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.

Jadi jelas letak nilai-nilai yang dianjurkan oleh Islam dalam melakukan segala usaha adalah menekankan kejujuran, keadilan, dan kemandirian.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu berusaha dalam memperoleh kehidupan di dunia yang sebaik-baiknya. Dalam surat Al-Qoshosh ayat 77 Allah berfirman:

³⁰ Ibid., 7

³¹ Yusuf Qaradhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 109

وَأَتَّبِعْ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص : ٧٧)

Terjemahnya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan". (QS: Al-Qashash : 77).³²

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah menganjurkan bahkan mewajibkan umat Islam untuk berusaha mencapai kenikmatan dunia disamping kenikmatan akhirat. Dengan kata lain umat manusia dilarang untuk bermalasan dan melupakan urusan duniawi (mencari rizqi), akan tetapi rizqi wajib dicari dengan cara yang sebaik-baiknya tanpa berbuat kerusakan, baik kerusakan secara vertical (hubungannya dengan Allah), maupun secara horizontal (dengan sesama manusia dan alam).

Dalam ayat lain Allah menganjurkan umat Islam untuk, bersama-sama ingin mewujudkan keadilan dan pemerataan, kesejahteraan sosial ekonomi. Dalam surat At-taubah ayat 60 Allah berfirman:

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: Gemarisalah Press, 1989), 623

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-taubah: 60).³³

Dari ayat di di atas, secara eksplisit Allah menyuruh umatnya untuk hidup sejahtera, di samping itu Islam juga mengajarkan umatnya untuk bergotong royong dalam membangun ekonomi, dengan kata lain Islam mewajibkan umatnya untuk saling bekerja sama dalam membangun ekonomi bersama.

5. Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi di daerah merupakan hal yang sangat penting di perhatikan, dengan ekonomi yang bagus akan mewujudkan masyarakat yang sejahtera oleh sebab itu peran pemerintah sangat penting di dalam mewujudkan perekonomian yang tinggi serta dukungan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi”

³³ Ibid , 288

Dalam membangun daerah pemerintah dapat melakukan beberapa cara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang baik seperti:

Kerjasama antar pemerintah daerah (*intergovernmental cooperation*) merupakan terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, di era otonomi sekarang kerjasama antar pemerintah daerah telah menjadi kebutuhan penting saat ini, jika di cermati banyak persoalan-persoalan pemerintah daerah yang tidak dapat ditangani sendiri, oleh sebab itu perlu adanya kebijakan publik (*policy network*) dan manajemen publik (*intergovernmental management*).

Konsep “kolaborasi horizontal” yang menggambarkan kerjasama antar pemerintah daerah (*intergovernmental alliances*) telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Kanada, dan beberapa negara industri baru dalam rangka pembangunan daerah mereka.

Kerjasama ini merupakan upaya ketiga pemerintah daerah untuk mensinergikan pola pembangunan dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pembangunan secara menyeluruh untuk menghindari pemborosan sumber daya dan anggaran maupun persaingan tidak sehat. Adapun bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh ketiga pemerintah ada beberapa sektor yaitu pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Kegiatan perekonomian yang dominan di kota adalah sektor perdagangan, hotel dan

restoran, di sektor pertanian khususnya peternakan, karena sesuai dengan potensi yang ada.

Kondisi alam yang sangat beragam menjadikan Indonesia kaya akan berbagai potensi sumber daya alam seperti kayu, rotan, maupun sumberdaya kelautan, sedangkan wilayah pantai yang indah sangat potensial untuk mengembangkan sektor pariwisata. Wilayah pesisir bagian selatan dan timur diprioritaskan bagi pengembangan sektor pertanian dan perkebunan, dimana komoditas jeruk, padi, kelapa sawit, kelapa, tebu dan karet memiliki potensi sebagai produk unggulan dengan nilai ekonomis yang cukup tinggi dan memiliki peluang pasar yang cukup luas.

Kondisi alam yang beragam dan curah hujan yang cukup menjadikan wilayah Indonesia berpotensi bagi perkembangan pertanian dan perkebunan. Di sektor pertanian, masyarakat banyak mengembangkan komoditi alam yang subur.

Pada kenyataannya, keberadaan lahan yang sangat luas dan potensial tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal bagi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Kecenderungannya, keberadaan lahan telah terpinggirkan dan terbiaskan oleh program pembangunan pertanian yang terlalu fokus pada padi, perkebunan, dan sayuran dataran tinggi.

Sampai saat ini belum ada komoditas unggulan yang bernilai ekonomis tinggi yang dihasilkan dari zona agroekosistem. Ubi kayu, jagung, ubi jalar,

padi gogo, dan kacang-kacangan merupakan komoditas utamanya. Meskipun keenamnya disebut sebagai komoditas utama, namun secara ekonomi semua komoditas tersebut belum mampu memberikan jaminan harga dan kehidupan yang layak (kesejahteraan) kepada sebagian besar pelaku utamanya, yaitu petani.